

## **BAB III**

### **PENUTUP**

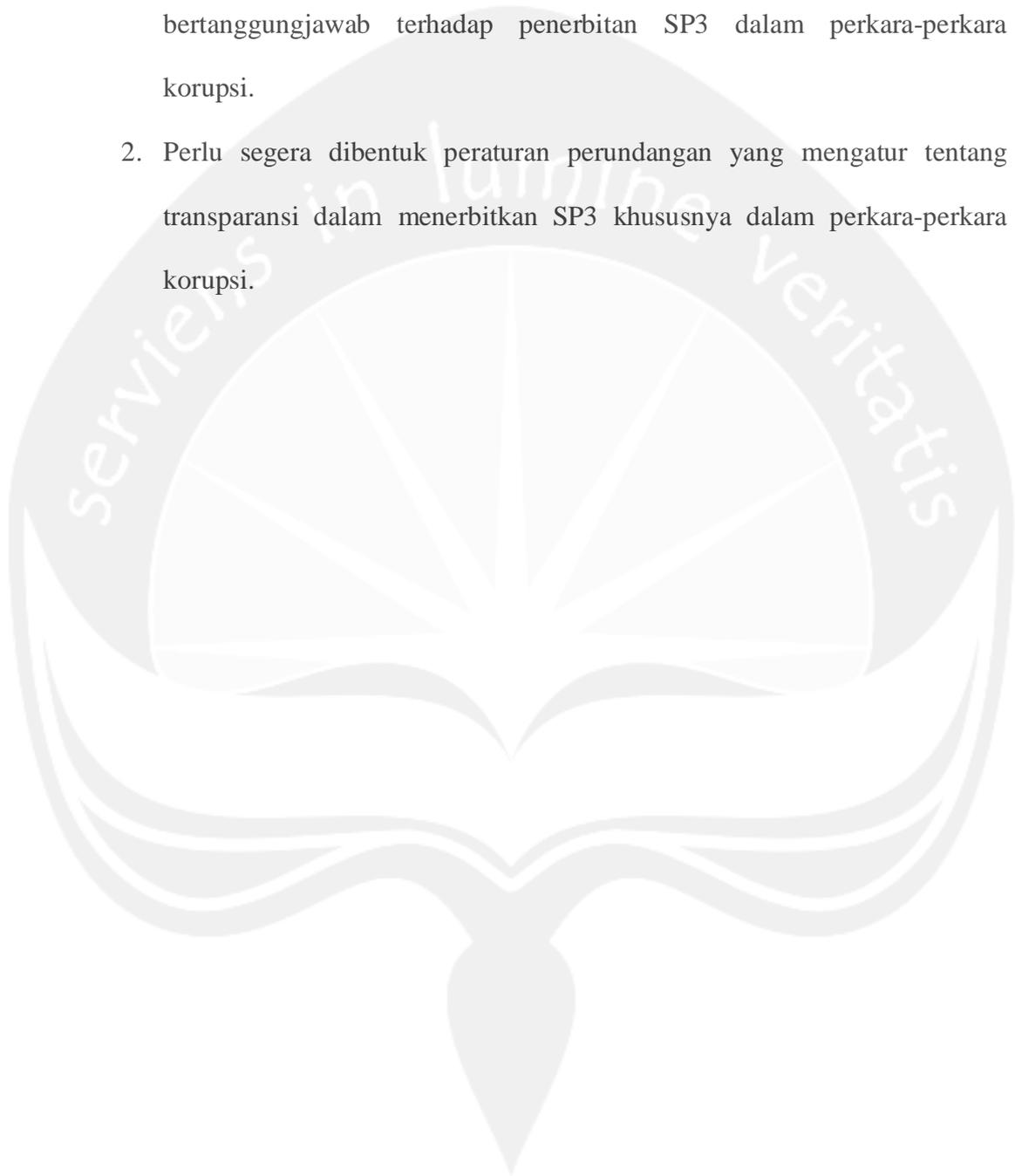
#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap penerbitan SP3 perkara korupsi Syamsul Nursalim dan mantan Presiden Suharto pada tahun 1999 ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dan KUHAP maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

Penerbitan SP3 dalam perkara korupsi banyak terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan KUHAP. Diterbitkannya SP3 dalam perkara korupsi dengan alasan bukan merupakan tindak pidana karena telah mengembalikan kerugian keuangan negara jelas melanggar peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi karena pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Adanya indikasi suap dan tekanan politik dalam penerbitan SP3 sehingga mempengaruhi objektivitas dari penyidik, seperti dalam perkara korupsi Syamsul Nursalim dan mantan presiden Soeharto Tidak adanya transparansi perkara-perkara korupsi yang dihentikan penyidikannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik agar lebih selektif dan bertanggungjawab terhadap penerbitan SP3 dalam perkara-perkara korupsi.
2. Perlu segera dibentuk peraturan perundangan yang mengatur tentang transparansi dalam menerbitkan SP3 khususnya dalam perkara-perkara korupsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Antonius Sujata, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005 *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harun M. Husein. 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Luthfi J. Kurniawan., et al, 2003, *Menyingkap Korupsi Di Daerah*, In-Trans, Surabaya
- Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI dalam Perspektif Hukum dan Implikasinya*, Gramedia, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sirajuddin., Et.al. 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum*, In-Trans, Malang
- Wisnubroto Al, 2002, *Praktek Peradilan Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Yogyakarta
- Yahya M. Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*-Edisi Maret 1999, Penerbit BPKP. Jakarta
- Zulkarnain, *Urgensi Eksaminasi Publik dalam Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, Jurnal Widya Yuridika, Edisi Januari 2004

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP- 1 11212005; Nomor: KEP- IAIJ.A1121200 Tahun 2005 Tentang Kerjasama antara KPK dengan Kejaksaan RI dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Website**

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) , Adnan Topan Husodo dan Emerson Yuntho, KPK harus kaji ulang SP3 Kasus Korupsi. 18 April 2007

[www.antikorupsi.com](http://www.antikorupsi.com) ,Suharko.*Pemberantasan Korupsi dan PenguatanKemauan Politik* , 4 April 2007

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Emerson Yuntho, Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi, 18 April 2007

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) *Laporan Akhir Tahun KPK 2006*, 26 April 2007

[www.indonesia.go.id](http://www.indonesia.go.id) , Arnaz Ferial Firman, Gagasan Pembubaran KPK Makin Jatuhkan Citra DPR, 28 Mei 2008

[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com) , Mujahid A. Latif, Menyambut Komisi Kejaksaan di Tengah Pesimisme Publik, 26 April 2007

[www.transparansiindonesia.com](http://www.transparansiindonesia.com) Masyarakat Transparansi Indonesia, Sebab-sebab korupsi, 24 juli 2007